

## **PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN IT CENTER DI DINAS BINA MARGA KABUPATEN KOTABARU**

**SIFA FAUZIAH**

FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Email : fauziahsyifaa05@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of the study is to know the application of good governance principle in managing the IT Center at Bina Marga Department Kotabaru regency. The researcher used descriptive qualitative research as the method of the study. From the result of the research, the researcher found that the application of Good Governance principle in managing IT Center at Bina Marga Department Kotabaru Regency was measured as well by using 9 principles, such as participation indicator, law indicator, transparency indicator, responsive indicator, consensus indicator, equitainment indicator, effectivity and efficiency indicator, accountability indicator, and visibility indicator. Lack of internet network and the minimum socialization occurred to be the obstacle factors in delivering the information. For the supporting factors, the researcher found human resource and information data became the supporting factors in managing IT center well.*

**Keyword :** *Management, Good Governance, and IT Center*

### **PENDAHULUAN**

Secara normatif, alasan hukum yang menjadi acuan regulatif dari IT di Indonesia mengacu kepada Intruksi Presiden. Regulasi ini sebagai payung hukum yang pertama sejak reformasi sebagai regulasi yang membuka ruang bagi pelaksanaan IT dalam organisasi pemerintahan termasuk kepada layanan publik. Kemudian intruksi presiden di topang dengan UU yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal. UU No. 11 Tahun 2008, pada awalnya sebagai regulasi yang diperuntukan untuk mengatur proses transaksi dalam bentuk digital, tetapi kemudian pada prakteknya lebih banyak dijadikan sebagai acuan penggunaan IT dalam aspek kehidupan baik di pemerintahan maupun untuk layanan publik. Sehingga regulasi ini pada akhirnya lebih di kenal dengan UU IT ketimbang dengan transaksi elektronik. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru, Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pada Penerapan Prinsip good Governmant dalam Pengelolaan IT Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

1. Partisipasi (Participation)
2. Penegakan hukum (Rule Of Law)
3. Transparansi (Transparency)
4. Responsif (Responsiveness)
5. Konsensus (Consensus Orientation)
6. Kesetaraan dan keadilan (Equity)
7. Efektifitas dan efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategi (Strategic Vision)

Organisasi dan kinerja governance dalam pasolong (2007:175). Sedangkan menurut Prawirosentoso dalam Pasolong (2007: 176) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sumber data dari hasil wawancara ditambah dengan beberapa data sekunder seperti dokumen dan laporan resmi pemerintah (BPS). Penelitian dilakukan di Kotabaru. Dengan unit penelitian

pada organisasi pemerintahan daerah yaitu pada dinas Binamarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 9 Indikator perwujudan *good governance*, yaitu: Partisipasi (Participation), Penegakan hukum (Rule Of Law), Transparansi (Transparency), Responsif (Responsiveness), Konsensus (Consensus Orientation), Kesetaraan dan keadilan (Equity), Efektifitas dan efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategi (Strategic Vision).

### Indikator Partisipasi

Pada hasil wawancara dengan masyarakat, meyebutkan jika partisipasi masih minim. Menurut Pramusinto (2014) partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa indikator Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik, hanya saja diperlukan sosialisasi lagi dalam penggunaan Aplikasi IT Center tersebut.

### Indikator Penegakkan Hukum

Menurut Bevola (2013) partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Hasil temuan lapangan menunjukkan jika aspek supremasi hukum sudah berjalan dengan baik. Meskipun kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Hasil temuan lapangan menunjukkan jika aspek supremasi hukum sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih terbatas pada persoalan implementasi. Hasil wawancara dilapangan, Salah satu informan menyebutkan jika secara perangkat Hukum penerapan IT Center d sudah sangat siap.

### Indikator Transparansi

Indikasi ini nampak pada keterbukaan informasi yang tersedia sangat dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat. Salah satu informasi mengenai jika selama ini dia bisa mendapatkan informasi terkait dengan jalan atau semacamnya melalui situs yang telah di

lansir oleh dinas Bina Marga. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa indikator Transparansi pada pengelolaan IT Center di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik.

### Indikator Responsif

Menurut Pramusinto (2013) Praktek Good Governance dilihat dari aspek stakeholder belum begitu optimal. Indikasi ini terlihat dari keterlibatan aktor yang masih minim. Aktor yang terlibat lebih di dominasi oleh pemerintah, sementara aktor swasta masih sangat sedikit.

### Indikator Konsensus

Pramusinto (2013) menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui musyawarah melalui konsensus. Hasil menunjukkan penelitian bahwa, untuk aspek berorientasi pada tujuan bersama sudah berjalan dengan baik.

### Indikator Kesetaraan dan Keadilan

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa indikator kesetaraan dan keadilan pada Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik.

### Indikator Efektifitas dan Efisiensi

Dilihat dari indikator efektifitas dan efisiensi, IT Center pada dinas Bina Marga sangat efektif dalam memberikan layanan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa indikator efektifitas dan efisien pada Dalam Pengelolaan It Center Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik.

### Indikator Akuntabilitas

Menurut Bevola (2009) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Di lokasi penelitian, bentuk pertanggung jawaban oleh dinas Bina Marga berlangsung dengan sangat baik. Sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

### Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis Indikator ini sangat nampak pada dinas Bina Marga. Visi menjadi suplemen yang menggerakkan layanan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa indikator Visi Strategi pada Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan IT Center Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru sangat membaik, dilihat dari 9 indikator prinsip Good Governance yaitu indikator partisipasi, indikator penegakan hukum, transparansi, responsive, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efesinsi, akuntabilitas serta indikator visistrategi. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan IT Center Kabupaten Kotabaru adalah sumber daya manusia, data dan informasi, jaringan internet dan anggaran.

### REFERENSI

- Adrian Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurniawan, Teguh 2006. *Pergeseran Paradigma Adminstrasi Publik*
- Muh. Arief Effendi. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayarani, Yani. 2009. *Memahami Konsep IT serta hubungannya dengan E Governnet. Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009)* ISSN: 1979-2328
- Pramusinto, Agus. 2009. *Reformasi kepemimpinan dan birokrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Suka Bumi: Yudhistira
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suhardi. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pedoman K3, *Dinas Dinas Perkajaan*

*Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala*. Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

- M. Nafarin. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Muh. Arief Effendi, 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sukrisno Agoes, I Cenik Ardana. 2017. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantang Membangun Manusia Seutuhnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Sukrisno Agoes. 2016. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Emirson. 2006. *Prinsip-Prinsip Good governance*. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol. 1 PP.23-26
- Pratikno (2005) *Good governance dan Governability*, *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 8 No. 3, Maret 2005 (231-248).